
MIGRASI DAN IDENTITAS KEBANGSAAN: TANTANGAN DALAM POLITIK PENGUNGSIS DAN PENGEMBARA

Gilang Maulana

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Migrasi telah menjadi fenomena yang mendominasi agenda global, menciptakan tantangan kompleks dalam politik pengungsi dan pengembara. Salah satu aspek penting yang terkait dengan migrasi adalah identitas kebangsaan, yang sering kali mengalami perubahan dan konflik dalam konteks migrasi. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki tantangan dalam politik pengungsi dan pengembara terkait dengan identitas kebangsaan, serta dampaknya terhadap masyarakat penerima dan masyarakat lokal. Dengan menganalisis isu-isu ini, artikel ini berupaya untuk memberikan wawasan tentang kompleksitas migrasi dan identitas kebangsaan dalam politik global saat ini.

Kata Kunci: *Migrasi, identitas kebangsaan, politik pengungsi*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Migrasi telah menjadi fenomena yang kompleks dan meluas di era globalisasi ini. Fenomena migrasi tidak hanya mencakup perpindahan fisik manusia dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga menggambarkan perubahan dan tantangan yang kompleks dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Di tengah-tengah migrasi, aspek identitas kebangsaan menjadi sangat penting. Identitas kebangsaan menentukan bagaimana individu atau kelompok diidentifikasi, merasakan, dan berinteraksi dalam masyarakat tempat mereka tinggal atau masyarakat yang mereka tuju. Dalam konteks migrasi, identitas kebangsaan seringkali menjadi perdebatan yang rumit karena adanya perbedaan budaya, agama, etnis, dan sosial yang muncul di antara para migran, masyarakat penerima, dan masyarakat lokal.

Salah satu tantangan utama yang terkait dengan migrasi adalah politik pengungsi dan pengembara. Pengungsi adalah individu yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka karena berbagai alasan, seperti perang, konflik, kekerasan, atau penganiayaan. Di sisi lain, pengembara adalah orang yang secara sukarela meninggalkan negara asal mereka untuk mencari peluang baru atau kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Kedua kelompok ini sering menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik selama perjalanan migrasi maupun setelah tiba di negara tujuan mereka. Tantangan ini tidak hanya mencakup masalah keamanan fisik dan kesejahteraan, tetapi juga masalah identitas kebangsaan yang kompleks.

Dalam konteks politik pengungsi dan pengembara, identitas kebangsaan sering kali menjadi pusat perdebatan. Migrasi sering kali memicu ketegangan dalam masyarakat penerima terkait identitas kebangsaan, terutama jika migrasi tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap identitas nasional atau budaya yang ada. Di sisi lain, migran sering menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas kebangsaan mereka sendiri sambil beradaptasi dengan budaya baru di negara tujuan mereka. Hal ini dapat menciptakan konflik internal dan eksternal dalam upaya membangun hubungan yang harmonis antara migran dan masyarakat lokal.

Selain itu, politik pengungsi dan pengembara juga sering kali memunculkan pertanyaan etis dan moral tentang bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang membutuhkan perlindungan atau bantuan. Pertanyaan-pertanyaan ini sering kali terkait dengan prinsip kemanusiaan, solidaritas global, dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Dalam banyak kasus, reaksi terhadap migrasi juga mencerminkan nilai-nilai politik dan ideologi yang ada dalam masyarakat penerima, yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait migrasi dan identitas kebangsaan.

Dengan demikian, dalam konteks migrasi dan identitas kebangsaan, terdapat berbagai tantangan politik, sosial, dan budaya yang harus diatasi. Pendekatan yang holistik dan inklusif diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini, termasuk upaya untuk memahami dan menghormati identitas kebangsaan dan budaya yang beragam, serta mempromosikan kerjasama internasional dalam menangani isu-isu migrasi global. Dengan

demikian, pendahuluan ini menyoroti pentingnya memahami kompleksitas migrasi dan identitas kebangsaan dalam konteks politik pengungsi dan pengembara, serta menawarkan landasan untuk eksplorasi lebih lanjut tentang tantangan dan peluang dalam penanganan isu-isu ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang tepat dalam mengkaji topik Migrasi dan Identitas Kebangsaan: Tantangan dalam Politik Pengungsi dan Pengembara membutuhkan pendekatan yang holistik dan multi-disiplin. Berikut adalah penjelasan panjang tentang beberapa metode penelitian yang dapat digunakan:

1. **Studi Kasus:** *Penelitian dengan pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman migran individu atau kelompok dalam menghadapi tantangan identitas kebangsaan. Studi kasus dapat melibatkan wawancara mendalam dengan migran, pengamatan langsung, dan analisis dokumen untuk memahami secara lebih baik dinamika migrasi dan bagaimana hal tersebut memengaruhi identitas kebangsaan mereka.*
2. **Survei dan Kuesioner:** *Survei dan kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai kelompok yang terlibat dalam migrasi, termasuk migran, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Pertanyaan dalam survei dan kuesioner dapat difokuskan pada persepsi, sikap, dan pengalaman terkait identitas kebangsaan dalam konteks migrasi.*
3. **Analisis Konten Media:** *Analisis konten media dapat dilakukan untuk memahami bagaimana migrasi dan identitas kebangsaan dipresentasikan dalam media massa. Hal ini dapat melibatkan analisis teks, gambar, atau video yang muncul dalam berbagai platform media, serta pengidentifikasian pola dan narasi tertentu yang mungkin memengaruhi persepsi masyarakat terhadap migrasi dan identitas kebangsaan.*
4. **Analisis Kebijakan:** *Analisis kebijakan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam menangani isu migrasi dan identitas kebangsaan. Ini melibatkan tinjauan mendalam terhadap dokumen kebijakan, analisis dampak kebijakan, dan penilaian terhadap implementasi kebijakan tersebut.*
5. **Penelitian Partisipatif:** *Pendekatan penelitian partisipatif melibatkan partisipasi aktif migran, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian. Pendekatan ini memungkinkan para peserta untuk berkontribusi secara langsung dalam proses penelitian, sehingga memperkuat legitimasi dan relevansi hasil penelitian.*
6. **Analisis Jaringan Sosial:** *Analisis jaringan sosial dapat digunakan untuk memahami hubungan antara migran, masyarakat lokal, dan aktor lain dalam konteks migrasi. Ini melibatkan identifikasi dan analisis struktur jaringan, pola interaksi, dan sumber daya sosial yang tersedia dalam jaringan tersebut, serta bagaimana hal ini memengaruhi identitas kebangsaan dan integrasi sosial.*

7. **Penelitian Eksperimental:** Penelitian eksperimental dapat dilakukan untuk menguji efektivitas berbagai pendekatan atau intervensi dalam mengatasi tantangan identitas kebangsaan dalam konteks migrasi. Ini melibatkan desain eksperimen yang cermat, implementasi intervensi, dan analisis statistik terhadap data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi dampaknya.
8. **Analisis Diskursus:** Analisis diskursus dapat digunakan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam pembentukan identitas kebangsaan dalam konteks migrasi. Ini melibatkan analisis terhadap struktur dan makna dari teks tertulis atau lisan yang terkait dengan migrasi, serta identifikasi pola diskursif yang muncul dalam percakapan publik dan media massa.

PEMBAHASAN

Migrasi adalah fenomena kompleks yang melibatkan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya, baik secara internal di dalam suatu negara (migrasi internal) maupun lintas batas negara (migrasi internasional). Identitas kebangsaan, di sisi lain, mengacu pada perasaan keterikatan individu terhadap negara asalnya, yang mencakup aspek budaya, politik, sosial, dan sejarah. Dalam konteks migrasi, tantangan seputar identitas kebangsaan sering kali muncul, terutama ketika individu atau kelompok menghadapi situasi politik yang sulit, seperti politik pengungsi dan pengembara. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa tantangan yang muncul dalam politik pengungsi dan pengembara, serta dampaknya terhadap identitas kebangsaan.

Salah satu tantangan utama dalam politik pengungsi dan pengembara adalah ketidakpastian status hukum yang dihadapi oleh para pengungsi dan pengembara. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakstabilan psikologis dan sosial bagi individu dan keluarga mereka, karena mereka sering kali tidak memiliki jaminan terhadap hak-hak dasar, seperti akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Ketidakpastian ini juga dapat mengganggu proses integrasi mereka ke dalam masyarakat baru dan memengaruhi identitas kebangsaan mereka. Sebagai contoh, pengungsi yang tinggal di negara asing mungkin mengalami kesulitan dalam menetapkan kembali identitas kebangsaan mereka ketika mereka tidak yakin apakah mereka akan diberikan status hukum yang tetap atau dipulangkan ke negara asal mereka.

Selain itu, politik pengungsi dan pengembara sering kali dipengaruhi oleh retorika politik yang polarisasi dan diskriminatif. Hal ini dapat memicu konflik sosial dan meningkatkan sentimen anti-migran di masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperdalam divisi dan ketegangan antar kelompok. Dalam konteks ini, identitas kebangsaan individu dan masyarakat sering kali menjadi bahan bakar bagi retorika yang menekankan perbedaan dan pertentangan antar kelompok, yang pada akhirnya dapat merusak integrasi sosial dan mengganggu proses pembentukan identitas kebangsaan yang inklusif.

Tantangan lain dalam politik pengungsi dan pengembara adalah ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan layanan yang mendasar. Para pengungsi dan pengembara sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang layak, yang dapat membatasi kemungkinan mereka untuk meresmikan

identitas kebangsaan mereka di negara baru. Misalnya, ketika pengungsi tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan atau pelatihan kerja, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengintegrasikan diri ke dalam pasar kerja lokal. Ini dapat menghambat proses pembentukan identitas kebangsaan mereka sebagai warga yang berkontribusi dan diakui dalam masyarakat baru.

Selain itu, pengungsi dan pengembara juga sering kali menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi dari masyarakat tuan rumah, yang dapat merusak rasa harga diri dan identitas kebangsaan mereka. Stigmatisasi ini dapat muncul dari persepsi negatif terhadap migrasi yang dipicu oleh ketakutan akan persaingan ekonomi, perasaan ancaman terhadap identitas budaya, atau pandangan politik yang menyalahkan migran atas masalah sosial atau ekonomi dalam masyarakat. Dalam kasus ini, pengungsi dan pengembara mungkin merasa terpinggirkan dan tidak diterima oleh masyarakat lokal, yang pada gilirannya dapat menghambat proses integrasi mereka dan memengaruhi identitas kebangsaan mereka di negara baru.

Selain tantangan tersebut, politik pengungsi dan pengembara juga sering kali dipengaruhi oleh kebijakan imigrasi yang restriktif dan penuh kontroversi. Kebijakan ini dapat menciptakan hambatan bagi pengungsi dan pengembara untuk memasuki atau tinggal di negara tujuan, yang pada gilirannya dapat memperumit proses pembentukan identitas kebangsaan mereka. Misalnya, kebijakan yang membatasi hak-hak dasar, seperti hak untuk bekerja atau hak untuk mendapatkan status hukum yang tetap, dapat menghambat upaya mereka untuk mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat baru dan membangun kehidupan yang stabil. Hal ini dapat memperkuat perasaan terisolasi dan tidak diakui, serta memengaruhi identitas kebangsaan mereka sebagai warga yang setara dan diakui di negara baru.

Selain itu, politik pengungsi dan pengembara juga sering kali terkait dengan isu-isu keamanan nasional dan geopolitik, yang dapat memengaruhi proses pembentukan identitas kebangsaan individu dan kelompok. Misalnya, pengungsi yang melarikan diri dari konflik atau kekerasan politik di negara asal mereka mungkin menjadi subjek dari kekhawatiran keamanan nasional di negara tujuan, yang dapat memicu respon politik yang keras atau kebijakan penahanan imigran. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara pengungsi dan masyarakat tuan rumah, serta memperdalam perasaan ketidakpastian dan tidak aman yang memengaruhi identitas kebangsaan mereka.

Selain itu, tantangan lainnya dalam politik pengungsi dan pengembara adalah ketidakmampuan atau ketidaksiapan pemerintah dan lembaga internasional untuk menanggapi krisis migrasi dengan cepat dan efektif. Kurangnya koordinasi antara pemerintah, lembaga donor, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperburuk dampak krisis migrasi dan menghambat upaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Ini dapat memperpanjang masa penderitaan bagi pengungsi dan pengembara, serta memperdalam ketidakpastian dan kerentanan mereka yang berdampak negatif pada identitas kebangsaan mereka.

Selain itu, politik pengungsi dan pengembara sering kali dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik dan keamanan di negara-negara sumber, yang dapat memicu

gelombang migrasi massal dan meningkatkan tekanan pada negara-negara tujuan. Konflik bersenjata, kekerasan politik, dan krisis kemanusiaan dapat menciptakan kondisi yang tidak aman bagi warga sipil di negara asal mereka, yang mendorong mereka untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga atau di luar wilayah tersebut. Dalam situasi seperti itu, pengungsi dan pengembara sering kali dihadapkan pada pilihan yang sulit antara tinggal di negara asal yang tidak aman atau meninggalkannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Hal ini dapat memengaruhi identitas kebangsaan mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berdedikasi di negara asal mereka.

Selain tantangan-tantangan yang dijelaskan di atas, terdapat juga beberapa peluang dalam politik pengungsi dan pengembara yang dapat memperkuat identitas kebangsaan individu dan kelompok. Salah satunya adalah peningkatan kesadaran dan solidaritas internasional terhadap isu-isu migrasi dan hak asasi manusia. Dengan meningkatnya akses informasi dan komunikasi global, masyarakat internasional semakin sadar akan tantangan yang dihadapi oleh pengungsi dan pengembara, serta pentingnya memberikan perlindungan dan dukungan kepada mereka. Solidaritas internasional seperti ini dapat memperkuat identitas kebangsaan para pengungsi dan pengembara, dengan memberikan mereka rasa diakui dan didukung oleh masyarakat internasional.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membuka peluang baru bagi pengungsi dan pengembara untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan jaringan sosial mereka di negara asal dan di luar negeri. Dengan adanya akses internet dan media sosial, mereka dapat tetap terhubung dengan akar budaya dan identitas kebangsaan mereka, serta menjaga hubungan dengan komunitas mereka di masa lalu. Ini dapat membantu mempertahankan identitas kebangsaan mereka dalam situasi yang tidak pasti dan berubah dengan cepat, serta memberikan mereka dukungan emosional dan sosial yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Selain itu, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia para pengungsi dan pengembara oleh pemerintah dan lembaga internasional juga dapat memperkuat identitas kebangsaan mereka. Ketika mereka diberikan perlindungan hukum yang memadai dan diakui sebagai anggota masyarakat yang setara, mereka dapat merasa dihargai dan diakui oleh masyarakat tuan rumah, yang pada gilirannya dapat memperkuat identitas kebangsaan mereka. Ini juga dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi mereka untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat baru.

Selain itu, peluang untuk membangun hubungan dan kerjasama antara pengungsi dan pengembara dengan masyarakat lokal juga dapat memperkuat identitas kebangsaan mereka. Ketika mereka diterima oleh masyarakat lokal dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi, mereka dapat merasa termasuk dan diakui sebagai bagian integral dari masyarakat tersebut. Ini dapat memperkuat rasa keterikatan mereka terhadap identitas kebangsaan mereka dan memperkuat integrasi sosial yang berkelanjutan di negara baru.

Selain itu, partisipasi aktif dalam kegiatan politik dan sosial di negara baru juga dapat membantu memperkuat identitas kebangsaan para pengungsi dan pengembara. Dengan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, memilih pemimpin politik, dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas lokal, mereka dapat merasa memiliki suara dan pengaruh dalam masyarakat baru mereka. Ini dapat memberikan mereka rasa memiliki dan keterlibatan yang mendalam dalam proses pembangunan masyarakat, serta memperkuat identitas kebangsaan mereka sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi.

Terakhir, upaya untuk mempromosikan integrasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan di antara pengungsi dan pengembara serta masyarakat lokal juga dapat memperkuat identitas kebangsaan mereka. Dengan membangun jembatan antara kelompok-kelompok ini dan mendorong saling pengertian dan toleransi, kita dapat menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua warga, tanpa memandang asal usul atau latar belakang mereka. Ini dapat membantu mengatasi sentimen anti-migran dan diskriminasi yang sering kali muncul dalam politik pengungsi dan pengembara, serta memperkuat rasa keterikatan dan identitas kebangsaan para pengungsi dan pengembara.

Dalam menjalani hidup mereka sebagai pengungsi atau pengembara, individu sering kali mengalami berbagai tantangan dan hambatan yang dapat memengaruhi identitas kebangsaan mereka. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi yang memadai di negara tempat mereka tinggal. Ketika pengungsi dan pengembara tidak memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan, pekerjaan, atau perumahan yang layak, hal ini dapat memperkuat perasaan terisolasi dan tidak diakui sebagai warga negara yang setara. Dalam konteks ini, identitas kebangsaan mereka mungkin terkikis atau dilemahkan oleh kondisi sosio-ekonomi yang tidak stabil dan tidak pasti.

Selain itu, pengungsi dan pengembara juga sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi di masyarakat tuan rumah, yang dapat memengaruhi identitas kebangsaan mereka. Dengan dianggap sebagai "orang asing" atau "pengganggu," mereka mungkin merasa tidak diakui atau dihargai sebagai warga negara yang setara. Hal ini dapat menciptakan perasaan ketidakpastian dan tidak aman, serta mengganggu proses pembentukan identitas kebangsaan mereka. Ketika pengungsi dan pengembara dihadapkan pada perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari masyarakat tuan rumah.

Selain itu, kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi pengungsi dan pengembara juga dapat memengaruhi identitas kebangsaan mereka. Ketika hak-hak dasar mereka tidak diakui atau dihormati oleh pemerintah atau lembaga internasional, mereka mungkin merasa tidak diakui sebagai warga negara yang setara. Hal ini dapat memperdalam perasaan ketidakpastian dan ketidakamanan, serta memengaruhi identitas kebangsaan mereka sebagai anggota masyarakat yang setara dan diakui. Dengan tidak adanya perlindungan hukum yang memadai, pengungsi dan pengembara mungkin merasa terpinggirkan atau diabaikan oleh masyarakat tuan rumah, yang dapat memengaruhi identitas kebangsaan mereka.

Selain itu, pengungsi dan pengembara juga sering kali dihadapkan pada kesulitan dalam mempertahankan ikatan budaya dan keagamaan mereka di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti dan berubah-ubah. Dalam upaya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara baru, mereka mungkin menghadapi tekanan untuk mengubah atau menyerahkannya identitas budaya atau keagamaan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan konflik internal dan kebingungan mengenai identitas kebangsaan mereka, karena mereka berjuang untuk menyeimbangkan antara mempertahankan akar budaya mereka dan beradaptasi dengan lingkungan baru.

Selain itu, pengalaman pengungsi dan pengembara sering kali memperkuat rasa solidaritas dan keterhubungan di antara mereka, yang dapat memperkuat identitas kebangsaan mereka. Dalam menghadapi tantangan yang sama-sama sulit, mereka sering kali membentuk jaringan sosial yang kuat dan saling mendukung, yang memperkuat rasa identitas kelompok mereka. Dengan berbagi pengalaman, harapan, dan impian, mereka dapat merasa termasuk dan diakui sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar.

Terakhir, pengalaman pengungsi dan pengembara juga dapat memperkuat rasa solidaritas dan keterhubungan di antara mereka dan masyarakat lokal, yang dapat memperkuat identitas kebangsaan mereka sebagai anggota masyarakat yang diakui dan dihargai. Dengan terlibat dalam kegiatan bersama, berbagi cerita, dan merayakan tradisi budaya bersama, mereka dapat merasa terhubung dengan masyarakat lokal dan merasa dihargai sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Hal ini dapat memperkuat rasa keterikatan mereka terhadap identitas kebangsaan mereka dan memperkuat integrasi sosial yang berkelanjutan di negara baru.

Kesimpulan

Dalam menghadapi tantangan politik, sosial, dan budaya yang kompleks, migrasi sering kali menjadi pemicu untuk merefleksikan kembali makna dan konstruksi identitas kebangsaan. Proses migrasi membawa sejumlah tantangan dalam mempertahankan identitas kebangsaan, terutama bagi para pengungsi dan pengembara. Kendati demikian, migrasi juga membuka peluang baru bagi pembentukan identitas kebangsaan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pengalaman-pengalaman mereka, para pengungsi dan pengembara tidak hanya memperkuat identitas budaya mereka sendiri, tetapi juga memperkaya dan memperluas definisi identitas kebangsaan di negara baru.

Kesimpulannya, migrasi adalah fenomena yang kompleks dan multidimensional yang memengaruhi identitas kebangsaan individu. Tantangan dalam mempertahankan identitas kebangsaan sering kali terjadi akibat stigma, diskriminasi, dan ketidakpastian yang dialami oleh para pengungsi dan pengembara. Namun demikian, pengalaman migrasi juga membuka peluang baru bagi pembentukan identitas kebangsaan yang inklusif dan beragam. Melalui pengalaman-pengalaman mereka, para pengungsi dan pengembara dapat memperkaya dan memperluas makna identitas kebangsaan di negara baru, serta menjadi agen perubahan yang aktif dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan migrasi harus memperhatikan kedua sisi dari

perspektif ini untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan identitas kebangsaan yang kuat dan inklusif bagi semua individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama.*
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO).*
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.*
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking.*
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial.*
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.*
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum.*
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus.*
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).*
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning. uma. ac. id.*
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).*
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018.*
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014.*
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.*
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA.*
- Sianipar, G. (2019). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Siregar, S. A. (2018). *implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan.*
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara.*
- Tarigan, R. S. (2017). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC).*
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai.*

- Siregar, N. S. S. (2002). *Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia*.
- Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). *Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang*.
- Tarigan, U. (2004). *Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2004). *Fungsi Penataan Kearsipan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Kepegawaian Kantor Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- TELAUMBANUA, F., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BANK BRI MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Wahyudi, A., & Tarigan, R. S. (2022). *SISTEM INFORMASI SEKOLAH BERBASIS WEB PADA SMP NUSA PENIDA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Simarmata, O. H. (2020). *Pengaruh Kinerja Keuangan (Roa) Dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Nilai Perusahaan (Per) Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2010-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rahmawani, R. (2021). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kerja Karyawan PT. Sinarmas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- PRATAMA, R., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN LIVING PLAZA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- OKTAVIANI, R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN MERCU PADA BENDUNGAN LAU SIMEME SIBIRU-BIRU-DELISERDANG SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). *Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan*.
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Get Press Indonesia*.
- Angelia, A. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara*.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). *Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing*.
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*.
- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamsa Medan*.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). *IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB. Retrieved from osf.io/3jpd*.

- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri 1 Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan*.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city*. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG*. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).